

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR JENIS ANGKUTAN BARANG
(Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batu)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Diperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik**



Oleh:

ALVIUS LENDE

NIM. 2017210194

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2021**

RINGKASAN

Berbagai upaya pemerintah untuk mengurangi akibat negatif pemakaian kendaraan bermotor untuk area serta warga. Ketentuan perundang-undangan di tingkat nasional serta di wilayah, penyusunan, serta fasilitas mengatasi serta mengelola pengujian kendaraan bermotor, pemerintah sudah khusus buat melaksanakan tugas serta gunanya cocok Undang- Undang Tidak hanya itu Dinas Perhubungan, sudah pengujian kendaraan bermotor

Kualitatif Method digunakan dalam research ini dengan fokus penelitian pada kebijakan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang, lokasi pada DisHub Kota Batu, dengan deskriptif penelitian menggunakan George Edward III, yakni keberhasilan implementasi berdasarkan 4 indikator yakni: komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi

Dinas Perhubungan Kota Batu berupaya menolong warga supaya dengan kasus angkutan benda cocok dalam lalu lintas. Perihal ini hendak owner benda serta warga, butuh didukung dengan standar pelayanan yang mencukupi buat menolong owner kendaraan bermotor angkutan benda dalam mengendalikan sudah layak uji buat melaksanakan aktivitas lalu lintas. Disamping itu kendala-kendala dalam pengujian kendaraan bermotor seperti praktek percaloan, praktek pungutan liar (pungli) sebagai masalah utama dalam pengujian kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan dan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi dikala ini dapat dikatakan jadi kebutuhan pokok warga buat melaksanakan kegiatan tiap hari serta sangat menunjang perekonomian warga pedesaan ataupun perkotaan. Transportasi bisa berbentuk angkutan individu serta angkutan universal. Angkutan universal sangat diperlukan oleh warga, baik yang tinggal di perkotaan ataupun pedesaan. Angkutan universal darat semacam bus kota, Angkutan Kota(Angkot) ataupun Angkutan Antar Kota serta Provinsi(AKAP) selaku perlengkapan transportasi sangat diperlukan oleh warga.

Dengan transportasi darat dikala ini pastinya hendak menyebabkan akibat yang kurang baik untuk kesehatan warga apabila tidak terdapatnya kontrol pemerintah terhadap pemakaian kendaraan bermotor. Oleh karena itu pemerintah menghasilkan peraturan Perihal ini disyarati dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kemudian Lintas serta Angkutan Jalur, Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan serta Pengemudi dan Keputusan Menteri Perhubungan No Kilometer 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Berbagai upaya pemerintah buat kurangi akibat negatif pemakaian untuk area serta warga ketentuan perundang- undangan di tingkatan nasional serta jadi

wilayah , penyusunan ruang kota, serta fasilitas. Mengatasi serta mengelola pengujian bermotor, pemerintah sudah membentuk unit spesial buat melaksanakan tugas serta gunanya cocok. Tidak hanya itu Dinas Perhubungan, sudah mengirimkan personilnya buat menjajaki pembelajaran serta pelatihan kompetensi pengujian kendaraan bermotor.

Sesungguhnya akibat pemakaian bisa dikurangi apabila senantiasa dalam keadaan yang baik, pemerintah sediakan timbal(unleaded gasoline) serta isi ialah prasyarat untuk pemakaian canggih yang sanggup kurangi emisi kendaraan secara signifikan, dan serta pengaruhi serta pada kesimpulannya pengaruhi mutu hawa. Pengendalian pencemaran hawa lewat kenaikan sistem transportasi terfokus pada 2 aspek

Pengujian kendaraan bermotor buat angkutan benda yang jadi salah satu moda transportasi berarti butuh dicoba buat menolong warga. Kendaraan bermotor angkutan benda sangat berarti dalam menolong warga universal dalam bermacam perihal semacam angkutan buat bahan santapan pokok, bahan baju, ataupun bahan bangunan yang ialah kebutuhan primer warga. Tidak hanya kebutuhan primer tersebut pula masih banyak kebutuhan warga yang butuh dipadati buat melaksanakan kehidupan tiap hari.

Pemenuhan kebutuhan warga tersebut wajib didukung transportasi angkutan benda serta dapat membagikan khasiat terhadap warga Sehingga organisasi pelayanan publik dalam perihal ini Dinas Perhubungan Kota Batu sangatlah dibutuhkan buat menolong terciptanya roda transportasi angkutan benda yang dapat menolong warga supaya terbentuk keamanan serta kedisiplinan dalam lalu

lintas lewat pengujian kendaraan bermotor angkutan benda cocok dengan Undang- Undang yang sudah diresmikan pemerintah.

Dinas Perhubungan Kota Batu berupaya menolong warga, kebutuhan supaya kasus benda yang tidak cocok dengan standar kelayakan dalam lalu lintas. Perihal ini hendak merugikan owner benda serta warga, butuh didukung dengan standar pelayanan yang mencukupi buat menolong para owner kendaraan bermotor angkutan benda dalam mengendalikan sudah melaksanakan aktivitas lalu lintas.

Disamping itu kendala-kendala dalam pengujian kendaraan bermotor seperti praktek percaloan, praktek pungutan liar (pungli) sebagai masalah utama dalam pengujian kendaraan bermotor, (SindoNews com:2021).

Sebab penjabaran diatas peneliti berkeinginan untuk mengkaji tentang **“Implementasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang”**. Demi menelaah lebih jauh tentang kebijakan pelayanan pengujian bermotor, dan bagaimana Dinas perhubungan dalam menjalankan pengujian bermotor.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi kebijakan dalam Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang di Kota Batu?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang di Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang di Kota Batu
2. Untuk mengetahui Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Kota Batu

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan dari sebuah penelitian, sehingga kegunaan dari penelitian “implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang” yakni:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan terhadap proses pengujian angkutan barang.
2. Hasil ini digunakan untuk bahan evaluasi dalam proses pengujian kendaraan angkutan barang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. G Subarsono. 2005. *Analisis. Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A.N.S Thomas. 1992. *Tanaman Obat Tradisional 2*. Kanisius: Yogyakarta
- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang: FIA UNIBRAW
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan publik / Said Zainal Abidin Yayasan Pancur Siwah Jakarta*. Wikipedia Citation.
- Ahmad Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta Azrul
- Chandler & Plano. 1982. *Dalam Kamus Wajib Ilmu Administrasi Publik, The Public Administration Dictionary*
- Dunn, N. William. 1999. *Analisis Kebijakan Publik. Edisi kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Grindle, Merilee S. 1980. *Political and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Prince University Press Indiahono
- Harbani Pasolong. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hassan. 2010. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara Jepara
- Hayat. 2019. *Manajemen Pelayanan Publik*. Pengarang: Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

- Hutahayan, Benny. 2019. *Peran Kepemimpinan Spiritual dan Media Sosial pada Rohani Pemuda*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA
- J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Marjan Miharja. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum, Pasuruan*. CV Qiara Media
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya
- Mulyadi. 2015. *Akuntansi Biaya Edisi 5*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM
- Nugroho, Taufan, dkk. 2014. *Buku Ajar Obstetri dan Mahasiswa Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Ofyar Z, Tamin. 2000. *Perencanaan Dan Pemodelan Transportasi* Penerbit: Penerbit ITB
- Philipus Ngorang. 2020. *Etika pelayanan publik sebuah pengantar*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Intelegensia Media
- Sinambela, Lijan Poltak, 2017. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan, dan Implementasinya*. Jakarta: Bumi Aksara Sinambela
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

_____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung :

IKAPI J Lexy

_____.2015.*Metode Penelitian kombinasi (Mix Methods)*.Bandung: Alfabeta

_____.2018.*Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*.Bandung:

Alfabeta

W. J. S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet VII, Diolah*

Kembali Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Balai

Pustaka: Jakarta

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Jurnal:

Utami Adinda Ayu, dkk. 2020. *Analisis Kualitas Kendaraan Bermotor Jenis*

Angkutan Barang. Volume 6 nomor 2 diakses 19 November 2021

Savitri Fania Mutiara. 2021. *Implementasi Pelayanan Pengujian Kendaraan*

Bermotor dalam Pemenuhan Persyaratan Teknis. Volume 4 Nomor 2

diakses 19 November 2021

Megawati Dine dkk. 2021. *Implementasi Strategi Pengujian Kendaraan Bermotor*. Volumen 7 nomor 2 diakses 19 november 2021

Internet:

Haryanto Adi. 2021. Cegah Pungli di Uji KIR, UPT pengendalian Kendaraan Beralih ke digital. <https://daerah.sindonews.com/read/590646/701/cegah-pungli-di-uji-kir-upt-pengujian-kendaraan-beralih-ke-digital-1636103484>.
Diakses 18 november 2021

Rahman Bobby. 2014. Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor: Kajian Implementasi dan Dampaknya di Aceh Utara. <https://repository.unimal.ac.id/1232/1/Kebijakan%20Pengujian%20Kendaraan%20Bermotor,%20Kajian%20Implementasi%20dan%20Dampaknya%20di%20Aceh%20Utara.pdf>. Diakses 18 November 2021